BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Pada masa penjajahan Belanda a telah dikenal adanya pemungutan pajak yang dikenal dengan nama "**OORLOGSOVERGANGS BLASING**", yang berarti " pajak peralihan ".

Pemungutan pajak dilakukan melalui suatu badan yang bernama **"INSPECTIFE FINANTIEN"** yang bertugas mengurus soal pemungutan pajak terhadap rakyat berdasarkan Undang-undang kolonial Belanda yang berlaku saat itu.

Pada tanggal 9 Maret 1941 **"DE INSPECTIFE FINANTIEN"** diganti oleh suatu badan yang bernama **"ZAIMUBA"** setelah Belanda menyerahkan kekuasaannya pada Jepang. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, **ZAIMUBA** diganti lagi menjadi "Inspeksi Keuangan dan pindah ke Gedung Concoride yang sekarang adalah Gedung Merdeka yang bertempat di Jalan Asia Afrika Bandung. Pada saat Agresi Militer Belanda II tahun 1948, Kantor Inspeksi Keuangan dipindahkan dari Bandung ke Tasikmalaya.

Setelah Agresi Militer berakhir, Kantor Keuangan yang berada di Tasikmalaya di non-aktifkan dan yang berada di Bandung tetap aktif bekerja dengan menggunakan sistem cooperative.

Pada tanggal 17 Desember 1949, Kantor Inspeksi Keuangan di bagi menjadi 2 kantor, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.01/1979 tanggal 6 April 1979, yaitu :

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur yang beralamat di Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 118 Bandung.

Mulai tanggal 1 April 1989 denganadanya Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK/1989 seluruh Kantor Inspeksi Pajak Indonesia, namanya diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak dan di Bandung sendiri Kantor Pelayanan Pajak menjadi 4 kantor, Yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur

   Beralamat di Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung (sekarang diubah menjadi KPP Bandung Karees)
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah

   Beralamat di jalan Purnawarman No. 21 Bandung (sekarang diubah menjadi KPP Cibeunying)

3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat

   Beralamat di jalan Soekarno Hatta Bandung (sekarang diubah menjadi KPP Bandung Tegallega)

4. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi

   Beralamat di Jalan Ria No. 1 Cimahi.

Pada tanggal 29 Maret 1994 terjadi lagi perubahan dengan adanya Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK.01/1994 sehingga KPP yang ada di Bandung dirubah menjadi :

1. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi, meliputi :

   Kota Administratif Cimahi dan Kabupaten Bandung dan berkantor di Jalan Raya Cimahi.

2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega, meliputi :

   Daerah pemerintahan wilayah (kewedanaan) Tegallega dan berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 216 Bandung.

3. Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying, meliputi :

   Daerah pemerintahan wilayah Cibeunying dan berkantor di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.

4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, meliputi :

   Daerah pemerintahan Karees termasuk kabupaten Sumedang, dan berkantor di Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.

5. Kantor Pelayanan Pajak Bojonegoro, meliputi :

Daerah pemerintahan wilayah Bojonegoro dan berkantor di Jalan Cipaganti No. 157 Bandung.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees didasarkan pada keputusan Menteri Keuangan RI dan diatur berdasarkan peraturan surat keputusan dari Direktur Jenderal Pajak No. 276/KMK.01/1989 pada tanggal 25 Maret 1989.

Dengan adanya surat keputusan tersebut, maka organisasi Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari 3 type, diantaranya :

1. Type A
2. Type B
3. Type C

Struktur organisasi di Kantor Pelayana Pajak Bandung Karees dipimpin oleh seorang kepala sebagai pimpinan yang bertugas sebagai berikut :

1. Mengamankan penerimaan pajak di wilayahnya
2. Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang dan kekuasaannya

Dalam sehari-harinya Kepala Kantor Pelayanan Pajak (Ka. KPP) dibantu oleh :

A. Kepala sub Bagian Tata Usaha, membawahi :

a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian

b. Urusan Keuangan

c. Urusan Rumah Tangga

B. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi, membawahi :

a. Sub seksi Data masukkan dan Data Keluaran

b. Penyajian Data dan Informasi

c. Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak

C. Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP), membawahi :

a. Kepala Sub seksi Pendaftaran Wajip Pajak

b. Kepala Sub seksi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

c. Kepala Sub seksi Ketetapan dan Kearsipan

D. Seksi PPN dan PTLL, membawahi :

a. Sub seksi PPN Industrti

b. Sub seksi PPN Perdagangan

c. Sub seksi PPN Jasa dan PTLL

d. Sub seksi Verifikasi PPN dan PTLL

E. Seksi PPH Perseorangan, membawahi :

a. Sub seksi Pengawasan dan Pembayaran masa PPh Perseorangan

b. Sub seksi Verifikasi PPh Perseorangan

F. Seksi PPh Badan, membawahi :

a. Sub seksi Pengawasan dan Pembayaran masa PPh Badan

b. Sub seksi Verifikasi PPh Badan

G. Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh

a. Sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan PPh pasal 21

b. Sub seksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan PPh

H. Seksi Penerimaan dan Keberatan, membawahi :

a. Sub seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak

b. Sub seksi Rekonsiliasi

c. Sub seksi Keberatan PPN dan PTLL

d. Sub seksi Keberatan PPH Badan dan Perseorangan

I. Seksi Penagihan, membawahi :

a. Sub seksi Piutang Pajak

b. Sub seksi Penagihan

2.3. Deskripsi Jabatan

A. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak dibidang perpajakan serta pembinaan kelompok tenaga fungsional dalam rangka melaksanakan kebijakan teknis.

Tugas dan tanggung jawab lainnya:

1. Menyusun rencana kerja KPP sebagai pelaksanaan tugas.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pendapat dan penilaian, serta penerimaan pajak.
3. Menyelenggarakan koordinasi, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan urusan tata usaha, laporan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan dalam rangka melaksanakan tugas pokok.

B. Kepala sub Bagian Tata Usaha

Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Kepala kasubag Tata Usaha dibantu oleh :

1. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian

   Urusan ini menangani masalah yang berkaitan dengan kepegawaian, misalnya : mengurus kenaikan pangkat, disiplin kerja, izin cuti, dll

2. Urusan Keuangan

   Urusan ini menangani hal yang berkepentingan dengan keuangan, misalnya : gaji pegawai, pengeluaran keuangan semua pembelanjaan barang

3. Urusan Rumah Tangga

Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga KPP Bandung Karees.

C. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Kepala Seksi Data dan Informasi langsung bertanggung jawab kepada kepala KPP, dalam menjalankan tugas sehari-harinya Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi dibantu oleh :

1. Sub seksi Data masukkan dan Data Keluaran
2. Penyajian Data dan Informasi
3. Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Tugas ke-3 seksi ini menghimpun dan mengolah serta menggali potensi yang dapat menunjang penerimaan negara di bidang perpajakan dari bahan-bahan yang dihimpun akan disalurkan ke seksi-seksi lain yang memerlukan.

D. Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP)

Seksi ini dikepalai oleh seorang kepala yaitu kepala TUP yang langsung bertanggung jawab pada kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam tugasnya kepala TUP dibantu oleh :

1. Kepala Sub seksi Pendaftaran Wajib Pajak

Bertugas melakukan urusan pendaftaran wajib pajak dan penyajian surat pemberitahuan.

2. Kepala Sub seksi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

Bertugas melakukan urusan penerimaan dan pengecekan surat pemberitahuan pajak.

3. Kepala Sub seksi Ketetapan dan Kearsipan

Bertugas melakukan urusan penerbitan surat ketetapan pajak dan kearsipan berkas wajib pajak.

E. Seksi PPN dan PTLL

Seksi ini dikepalai oleh seorang kepala seksi PPN dan PTLL yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam tugas sehari-hari kepala seksi PPN dan PTLL di Bantu oleh :

1. Sub seksi PPN dan Industri

Bertugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan kena pajak dan kepatuhan surat kena pajak, masa serta melakukan konfirmasi faktur pajak pada sector industri.

2. Sub seksi PPN Perdagangan

Bertugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan, pengecekan surat pemberitahuan masa penyerahan dan penyusunan laporan perkembangan pengusaha.

3. Sub seksi PPN Jasa dan PTLL

Bertugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan, pengecekan surat pemberitahuan masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun

laporan perkembangan PKP dan kepatuhan surat pemberitahuan masa serta melakukan konfirmasi faktur pajak sector jasa dan PTLL.

4. Sub seksi Verifikasi PPN dan PTLL

Bertugas melakukan urusan verifikasi surat pemberitahuan masa PPN, PPnBM, PTLL, PKP yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukan surat pemberitahuan.

F. Seksi PPH Perseorangan

Seksi ini dikepalai oleh seorang kepala seksi PPh Perseorangan yang bertanggung jawab langsung kepada kepala KPP, dalam tugasnya dibantu oleh :

1. Sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Perseorangan

Bertugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan, serta memantau dan menyusun laporan efektifitas pembayaran masa pajak penghasilan perseorangan.

2. Sub seksi Verifikasi PPh Perseorangan

Bertugas melakukan urusan pemantauan verifikasi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan perseorangan, wajib pajak yang tidak terdaftar dantidak dimasukkan surat pemberitahuan tahunan.

G. Seksi PPh Badan

Seksi ini dikepalai oleh seorang kepala seksi PPh Badan yang bertanggung jawab langsung kepada kepala KPP, dalam tugasnya dibantu oleh :

1. Sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan

   Bertugas melaksanakan pemantauan, penatausahaan, pembayaran masa, penyerahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran surat pemberitahuan tahunan PPh badan.

2. Sub seksi Verifikasi PPh Badan

   Bertugas melaksanakan urusan verifikasi atas surat pemberitahuan masa PPh badan.

H. Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh

Seksi ini dikepalai oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala KPP dalam tugasnya dibantu oleh :

1. Sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh

   Bertugas melakukan urusan pemantauan, penatausahaan, pembayaran masa, penyerahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa.

2. Sub seksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan PPh

   Bertugas melakukan urusan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan pajak penghasilan karyawan, surat pemberitahuan masa pajak rekanan, sewa, bunga, wajib pajak

yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan.

I. Seksi Penerimaan dan Keberatan

Seksi ini dikepalai oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala KPP, dalam tugasnya dibantu oleh :

1. Sub seksi Keberatan PPh Perseorangan

   Bertugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan pajak penghasilan perseorangan.

2. Sub seksi Keberatan PPh Badan dan Pemotongan dan Pemungutan Pajak

   Bertugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan PPh badan dan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.

3. Sub seksi Keberatan PPN dan PTLL

   Bertugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan PPN, pajak penjualan atau barang mewah dan pajak tidak langsung lainnya.

4. Sub seksi Penerimaan

   Bertugas melakukan penerimaan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

J. Seksi Penagihan

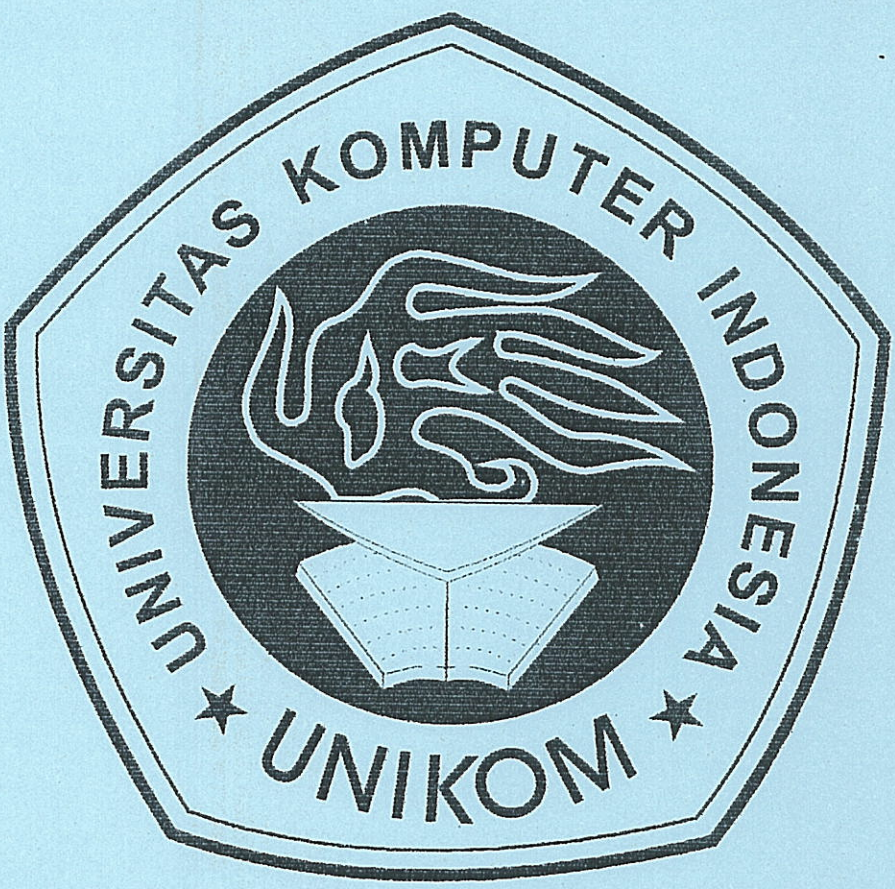
Seksi ini dikepalai oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala KPP, yang mempunyai tugas :. Melakukan taguhan pajak negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4. Aspek Kegiatan Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak langsung lainnya, dalam daerah wewenang berdasarkan kebijaksanaan yang diterapkan oleh Dirjen Pajak

Kantor Pelayanan Pajak juga mempunyai fungsi antara lain, yaitu :

1. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak.
2. Melakukan tata usaha pajak
3. Melakukan urusan tata usaha penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi PPh,PPn, dan pajak tidak langsung lainnya.
4. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data serta penyajian informasi.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM